

Wajib Pajak Pengguna e-SPPT di Bogor Dapat Diskon PBB

BOGOR (IM) - Pemerintah Kota Bogor memberikan pengurangan biaya (diskon) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak yang sudah menjadi pengguna e-SPPT PBB P2 di website resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Bapenda yang telah melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi dan terus berkolaborasi dengan semua mitra untuk mengkomunikasikan dengan para wajib pajak untuk menjaga keadaan keuangan Kota Bogor tetap relatif baik dan terkendali.

"Inovasi e-SPPT adalah ikhtiar Pemkot Bogor untuk memaksimalkan untuk pemanfaatan teknologi agar lebih efisien dan ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya terhadap wajib pajak dalam memperoleh SPPT PBB-P2, ini sejalan dengan visi Kota Bogor sebagai kota cerdas," kata Bima, dilansir dari Antara, Kamis (3/2).

Menurut Bima, keringanan atau stimulus yang diberikan merupakan bentuk pemahaman dari kondisi yang dihadapi para wajib pajak yang diatur melalui regulasi Perwali Nomor 7 tahun 2022.

Penghapusan denda pajak sampai dengan kewajiban tahun 2021 yakni pemberian pengurangan PBB-P2 atas pokok maupun tunggakan dan pembebasan denda administrasi atas tunggakan, bergradasi yang diutamakan untuk pokok tahun 2022. Wajib pajak dapat mendaftarkan diri di website Bapenda Kota Bogor wajib pajak akan diberikan diskon pembayaran pokok pajak PBB-P2 Tahun 2022, untuk Bulan Februari 15 persen, Maret 10 Persen dan April 5 persen.

Selain itu, ada diskon pokok piutang pajak PBB-P2 tahun 2021 sampai dengan tahun 1992 sebesar 20 persen untuk pembayaran bulan Februari, Maret dan April.

Bima meminta agar ke depan, Bapenda lebih menggenarkan inovasi dan meny-

sialisasikan kepada seluruh wajib pajak, termasuk stimulus keringanan, sehingga diharapkan seluruh wajib pajak dan masyarakat yang memiliki tanah bangunan agar segera mendaftar E-SPPT.

Hal ini mengingat baru 54.869 wajib pajak atau 20,12 persen yang telah melakukan registrasi E-SPPT secara mandiri sehingga diharapkan target yang ada tidak hanya tercapai, tapi bisa terlampaui untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi.

Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana melaporkan target pendapatan PBB-P2 Tahun 2022 yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp145 miliar dari pokok ketetapan yang tercetak tahun 2022 sebanyak Rp230 miliar.

Rata-rata pembayaran PBB-P2 yang terkumpul dalam beberapa kurun waktu terakhir sebesar 71-74 persen.

Sementara pada tahun 2021, kata dia, dilaporkan realisasi pendapatan PBB-P2 sebanyak Rp1159 miliar, menjadi capaian tertinggi pendapatan PBB-P2 selama ini walaupun dalam kondisi pandemi.

"Satu syarat perbedaan persyaratan pemberian pengurangan atau stimulus yang diberikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu wajib pajak yang sudah terdaftar di E-SPPT," kata Deni.

Deni menjelaskan, tahun 2022 ditetapkan sebagai tahun pencanangan E-SPPT secara massal menuju digitalisasi SPPT PBB-P2 di Kota Bogor.

Pada tahun berikutnya Bapenda Kota Bogor rencananya sudah tidak lagi mencetak SPPT PBB-P2 untuk mendukung kebijakan mengurangi penggunaan kertas (paperless) maupun efisiensi anggaran.

Wajib pajak tinggal mendownload E-SPPT di laman Bapenda Kota Bogor yang tersedia. "Namun demikian pada tahun 2022 masih dilaksanakan cetak massal terhadap 80 persen SPPT atau sebanyak 218 ribu SPPT," jelasnya. ● PP

Kota Bandung Siapkan Ruang Isolasi di Setiap Kecamatan

BANDUNG (IM) - Pemerintah Kota Bandung menyiapkan ruang isolasi mandiri di setiap wilayah kecamatan guna mengantisipasi potensi adanya gelombang ketiga Covid-19. "Sekarang ruang isolasi (isolasi mandiri) di setiap kecamatan sudah disiapkan," kata Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana di Bandung, Jawa Barat, dilansir Antara, Kamis (3/2).

Adapun ruang isolasi itu disiapkan di 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan keluarga.

Ruang isolasi itu dapat digunakan jika ada warga yang terkonfirmasi Covid-19 dan tak memungkinkan untuk melakukan isolasi di rumahnya.

Selain itu, Yana mengatakan Pemkot Bandung pun meminta kepada 30 rumah sakit rujukan agar menyiapkan

tempat tidur untuk mengantisipasi pasien Covid-19. Meski begitu, ia berharap tempat tidur itu tidak akan digunakan. "Meski kita harap tidak dipakai gitu, jadi kita sediakan sekitar 600 sampai 700 tempat tidur," kata Yana.

Yana mengatakan, di awal Januari 2022 ini kasus Covid-19 di Kota Bandung mengalami peningkatan secara drastis. Menurutnya selama satu bulan terakhir, peningkatan kasus Covid-19 mencapai 3.000 persen lebih. "Memang peningkatannya luar biasa, jadi kita harus waspada, panik nggak perlu, tapi waspada," kata Yana.

Adapun pada 2 Januari 2022, kasus aktif Covid-19 berjumlah 21 orang di Kota Bandung. Sedangkan pada 2 Februari 2021, jumlah kasus aktif Covid-19 menjadi 793 orang. ● pra

Rudy Susmanto Nilai Disdik Kab Bogor Tak Tanggap Pandemi Covid-19



RUDY SUSMANTO
Ketua DPRD Kabupaten Bogor

BOGOR (IM) - Memasuki gelombang ketiga masa Pandemi Covid-19, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menilai Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, tidak tanggap mengantisipasi pandemik. Pasaunya, sekarang mulai meningkat varian baru.

Menurut Rudy, Disdik tidak mengajukan anggaran untuk program peningkatan sistem pendidikan di masa Pandemi Covid-19 ini. Dalam perencanaan tahun 2022 yang paling diutamakan hanya rehab gedung sekolah. "Ditanya soal program (Disdik, red) di tahun 2022 itu apa? Mereka tidak mengajukan anggaran untuk inovasi pendidikan. Mereka hanya meminta agar Rehab gedung sekolah dimaksimalkan," paparnya, Kamis (3/2).

Mendengar hal itu, Politisi Partai Gerindra ini menegaskan jika pihak Disdik jelas tidak memiliki kitab. Padahal, untuk investasi saat ini dibutuhkan sumber daya manusia melalui pendidikan. "Jika selalu rehab atau pembangunan serta me-

beler yang diajukan kemungkinan tidak akan ada peningkatan di sektor pendidikan. Terlebih, pandemi covid-19 ini banyak murid yang belajar di rumah. Akhirnya, gedung atau meubeler yang diajukan dan dibangun tidak akan bertahan lama, bahkan baru berjalan 2 tahun sudah rusak kembali," tegasnya.

Rudy meminta agar Disdik berkoordinasi lagi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappedalibang) Kabupaten Bogor, untuk merencanakan inovasi pendidikan.

"DPRD telah berkali-kali mengingatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Salah satunya, dengan meminta Dinas Pendidikan untuk merangkul akademisi seperti IPB, ITB, UNHAN dan LIPI untuk membuat kajian tentang metode terbaik pembelajaran di tengah pandemi seperti ini. Agar pola pembelajaran anak-anak kita ini punya konsep yang jelas, jangan sampai beberapa sekolah mengambil kebijakan masing-masing," tandas Rudy. ● gio

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

NELAYAN BLOKIR JALUR PANTURA

Sejumlah nelayan memblokir jalan jalur Pantura, Tegal, Jawa Tengah, Kamis (3/2). Blokir jalur Pantura tersebut dampak pemerintah setempat lambat melakukan proses perizinan melaut bagi eks nelayan kapal dengan alat tangkap cantrang yang beralih ke alat tangkap jaring tarik berkantong, sehingga mereka selama enam bulan tidak melaut.

Wagub Uu: Digitalisasi Jadi Salah Satu Solusi Dorong Perkembangan UMKM

Uu Ruzhanul Ulum menuturkan, perkembangan pasar digital harus disertai dengan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada pelaku UMKM. Maka, ia mendorong Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Sumedang melakukan dua hal tersebut.

SUMEDANG (IM)

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, digitalisasi menjadi salah satu cara efektif mendorong pelaku UMKM di tengah situasi pandemi Covid-19. Dengan digitalisasi, kinerja UMKM diharapkan

akan kembali bergairah.

Hal itu dikatakan Uu saat meluncurkan aplikasi _marketplace_ "Inginapa Indonesia" dengan tema "Dari Daerah untuk Dunia di Pasar Sandang, Kabupaten Sumedang, Rabu (2/2).

Uu juga melaporkan, ber-

dasarkan data Bank Indonesia (BI) Jabar, transaksi e-commerce di Jabar tumbuh sampai 59,03 persen pada pertengahan triwulan III Tahun 2021. Angka itu berpotensi meningkat pada 2022.

"Berarti tidak menutup kemungkinan tahun 2022 ini akan semakin meningkat transaksi masyarakat dengan dunia digital. Perlu juga kami sampaikan bahwa pangsa pasar Jawa Barat, yang memang dunianya dunia digital, dibandingkan dengan provinsi lain yaitu nomor satu Jawa Barat," kata Uu di laman Pemrov Jabar, Kamis (3/2).

Uu pun menuturkan, perkembangan pasar digital harus disertai dengan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada pelaku UMKM. Maka,

ia mendorong Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Sumedang melakukan dua hal tersebut.

"Termasuk para pedagang warung. Di dalamnya mungkin bukan (hanya) anak muda, bisa jadi ibu-ibu atau bapak-bapak. Sehingga pada saat masuk aplikasi melakukan transaksi masih bingung. Kedah kumaha ieu ngalaksanakeun_ permohonan barang dari yang lain. Karena salah satu solusi tentang kebuntuan, tentang keberangannya UMKM di Jawa Barat, mudah-mudahan Inginapa Indonesia adalah menjadi salah satu daya ungkit dan solusi untuk berkembangnya UMKM di Jawa Barat," kata Uu.

Sementara Direktur PT Inginapa Indonesia Sobar Bachtiar menuturkan, awal mula berdirinya aplikasi Inginapa Indonesia untuk mewujudkan aspirasi pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang. Kemudian, penjualan secara digital dapat mempermudah transaksi dan promosi pada masyarakat luas.

"Mudah-mudahan dengan di-launchingnya aplikasi ini, saya harap Kabupaten Sumedang khususnya, bisa bertransformasi dalam hal perekonomian dari manual ke digital. Mudah-mudahan juga pemerintah akan men-support kita, saling berkolaborasi untuk bisa mengembangkan UMKM yang ada di daerah," kata Sobar. ● pra

Bagikan Sertifikat, Ade Yasin Minta Camat, Lurah dan Kades Berperan Aktif Sukseskan Program PTSL

BOGOR (IM)

Bupati Bogor, Ade Yasin menyerahkan sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Bogor secara simbolis kepada lima orang perwakilan, di PT. Mahkota Manggis, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Kamis (3/2).

Ade Yasin meminta camat, lurah, dan kepala desa untuk berperan aktif sukseskan program PTSL. Hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kab Bogor, Muhamad Romli, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Kav. Gan Gan Rusgandara, perwakilan Polres Bogor, Kepala Cabang bank BJB Cibinong, Camat Cibungbulang, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Pesan saya kepada camat dan kepala desa serta lurah, harus berperan aktif menyukseskan program PTSL bekerjasama

dengan unsur Forkopimcam, para Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat. Kemudian memproses sesuai ketentuan, jangan memberatkan masyarakat dan harus transparan, guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari," tandas Ade.

Ade Yasin mengatakan, hari ini saya serahkan secara simbolis kepada 173 penerima bidang sertifikat hak atas tanah, dari realisasi di seluruh Kabupaten Bogor tahun 2021 sebanyak 116. 315 bidang Sertifikat Hak atas Tanah (SHIT) dan sebanyak 142.954 Peta Bidang Tanah (PBT) yang akan ditindaklanjuti dengan penberikan sertifikat tanah yang tersebar di 37 desa dari 10 kecamatan.

"Program PTSL sangat banyak manfaatnya yakni, meminimalkan jumlah sengketa pertanahan, memetakan bidang tanah yang belum dipetakan dari bidang tanah yang telah terdaftar dan

bersertifikat, membangun peta kadaster untuk mendukung kebijakan one map policy, mengatasi permasalahan batas administrasi desa, kecamatan, dan kabupaten, mendukung program strategis nasional seperti pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tata ruang nasional dan daerah, right of way, dan penerimaan pajak yang lebih efektif seperti PBB, PPH, BPHTB," ungkap Ade.

Ade menuturkan, Pemerintah Kabupaten Bogor turut serta membantu mensukseskan kegiatan pensertifikatan tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sekaligus mendukung program Nawacita Presiden RI melalui Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dan meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi pertanahan berstandar dunia.

"Nantinya semua desa dan

kelurahan di Kabupaten Bogor akan memperoleh pensertifikatan tanah melalui program PTSL baik dengan APBN maupun APBD, diberikan secara bergiliran untuk mewujudkan desa atau kelurahan lengkap se-Kabupaten Bogor," ujar Bupati Bogor, Ade Yasin.

Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, Sepyo Achanto mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bogor dan jajaran DPRD yang telah mendukung kegiatan PTSL di Kabupaten Bogor.

Pelaksanaan kegiatan PTSL untuk tahun 2021 didukung selain anggaran APBN, juga didukung anggaran APBD Kabupaten Bogor. Sejak tahun 2017 sampai 2021 kami bisa terus melaksanakan program ini, dan mewujudkan selesainya program di seluruh Kabupaten Bogor pada tahun 2024.

"Tahun 2021 target yang dilaksanakan di kantor induk

untuk Peta Bidang Tanah (PBT) sejumlah 121.406 bidang dan teralisasi 121.452 bidang. Sementara Sertifikat Hak atas Tanah (SHIT) target sebanyak 112.880 bidang dan teralisasi 111.218 .

Untuk kegiatan yang dilaksanakan di kantor perwakilan, target Peta Bidang Tanah (PBT) sebanyak 21.500 bidang, teralisasi 21.502 bidang, sedangkan Sertifikat Hak atas Tanah (SHIT) target 5.411 bidang, teralisasi 5.097 bidang," jelas Sepyo.

Artinya, lanjut Sepyo, keseluruhan target PBT di Kabupaten Bogor sebanyak 142.906 bidang, teralisasi 142.954 bidang atau 100 persen. SHIT target seluruhnya 118.291 bidang, teralisasi 116.315 atau 98,3% yang terdiri di 10 kecamatan dan 37 desa. Hari ini diserahkan secara simbolis dari keseluruhan realisasi, sertifikat PTSL sebanyak 173 bidang kepada masyarakat. ● gio

PT Migas Hulu Jabar Ingin Penambahan Modal untuk Pengembangan Bisnis

BANDUNG (IM)

Untuk membahas mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2014 tentang penyertaan modal pada PT Migas Hulu Jabar (MHJ), Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bandung & Cimahi, Rafael Situmorang SH mengundang direksi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Rafael mengatakan, pihaknya ingin menyerap masukan dari para peserta yang hadir pada kegiatan tersebut untuk menjadi pertimbangan Raperda tersebut yang nantinya akan menjadi Peraturan Daerah (Perda). "Kami menyerap aspirasi terhadap raperda untuk menjadi perda nantinya," kata Rafael saat Sosialisasi Raperda di Kota Cimahi, Kamis (3/2).

Menurutnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta penyertaan modal pada PTMHJ beserta bentuk hukumnya, di mana BUMD tersebut merupakan salah satu penyumbang Penghasilan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi. "Jadi pemerintah provinsi Jawa Barat meminta penyertaan modal dengan bentuk hukumnya. Intinya PT Migas Hulu ini meminta modal. Ini BUMD yang memberikan APBD terhadap Jabar," ucapnya.

Rafael menjelaskan, pada intinya PT MHJ ini meminta modal tambahan agar dapat mengembangkan usahanya "Jadi PT Migas Hulu ini meminta



Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil I Kota Bandung dan Kota Cimahi Rafael Situmorang SH menyosialisasikan Raperda No.10 tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Migas Hulu Jabar di Neglasari Villa Jl. Sirnarasa No. 37B Cibabat Cimahi, Kamis (3/2).

modal untuk bertarung untuk dapat bertarung mendapatkan proyek yang besar," jelas Rafael.

Namun demikian, dirinya menginginkan agar PT MHJ ini menambahkan modal untuk memperkuat usaha yang sudah dijalankan saat ini dibandingkan menambah modal untuk usaha yang belum tentu jelas kedepannya akan berkembang. "Kalo bagi saya ini perusahaan sudah untung, kalo menurut saya, kalo untuk menambah modal digunakan saja untuk memperkuat usaha yang sudah untung," ujarnya.

"Saya sendiri belum menyetujui untuk menambah bisnis baru. Menurut saya kalo untuk tambah modal untuk memperkuat bisnis yang sekarang. Tapi MHJ optimis pada penambahan modal sekarang," tambah Rafael.



Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bagian Divisi Hukum dan Kepatutan PT MHJ, Gema Akbar menanggapi hal tersebut. Menurutnya hingga saat ini pihaknya sudah beberapa kali melakukan pembahasan dengan DPRD Jabar dan Pemerintah Provinsi Jabar dalam mengusulkan dua Raperda.

"Kami sudah melakukan beberapa kali pembahasan dengan DPRD Jabar termasuk dinas di provinsi. Sebenarnya kami ada mengusulkan ada 2 perda," kata Gema.

Dua Raperda tersebut menurut Gema mengenai lingkup kegiatan usaha dan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah tertuang Perda No. 14 Tahun 2013 dan No. 10 Tahun 2014. "Pertama bidang usaha, yaitu pembentukan badan usaha



milik daerah bidang minyak dan gas bumi lingkup kegiatan usaha hulu yang sudah ada di Perda Nomor 14 Tahun 2013," ucap Gema.

"Yang kedua Perda Nomor 10 Tahun 2014 mengenai penyertaan modal pemerintah daerah provinsi jabar pada PT Migas Hulu Jabar," tambahnya.

Mengenai Raperda ini, pihaknya ingin mengembangkan usahanya dan mengembangkan bisnis yang kini sudah mendirikan anak perusahaan di lima saham yang berbeda "Kaitannya dengan perda, BUMD tidak boleh mengelola bisnis lain. Jadi kami membentuk anak usaha yang terdiri 5 sahamnya. Kenapa terpisah karena kami ingin mengembangkan bisnis," jelasnya.

Seperti pengalaman sebelum-



nya, Gema menjelaskan, saat ini kasus positif Covid-19 beberapa bulan lalu dalam penyediaan oksigen bagi masyarakat, pihaknya terkendala dengan regulasi dalam cakupan bisnisnya.

"Jadi untuk pengembangan bisnis, Pak Gubernur kemarin terkait Covid mengizinkan untuk menyediakan oksigen, namun terkendala aturan, tapi kami punya bidang usaha lain. Namun Alhamdulillah kami bisa memasok oksigen," jelasnya.

"Kami juga ditunjuk pak gubernur untuk mengelola TPPAS di Cirebon untuk diolah menjadi bahan bakar. Lagi lagi, jika kami tidak merubah bidang usaha kami, kami terkendala penugasan Gubernur," tutupnya. ● lys